BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Sejarah singkat PT. PLN

Sejak masa penjajahan Belanda sampai awal tahun 1942, di Indonesia dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan pasokan tenaga listrik milik pemerintah, daerah otonom (*Gemente*) atau gabungan keduanya. Di Jawa Barat, khususnya Bandung, perusahaan pengelola serta penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum itu adalah *Banduegsche Elektriciteit Maatschappij* (BEM) yang berdiri pada tahun 1905. pada tanggal 1 januari 1920, perusahaan perseroan *Gemeenshaapplijk Electrictient Bedrijp Voor Bandoeng* (GEBEO) menggantikan BEM. Penggantian ini dikukuhkan dengan akte pendirian Notaris Mr. Andrian Hendrik Van Ophusein-No. 213 tanggal 31 Desember1919. Pada masa pendudukan Jepang antara 1942 – 1945 pendistribusian listrik dilaksanakan oleh ***Djawa Denki Djigo Sha Bandoeng Shi Sha***, dengan wilayah kerja diseluruk pulau Jawa.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tibanya saat penyerahan kedaulatan RI dari pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1957 merupakan awal penguasaan pengelolaan perlistrikan di seluruh Indonesia oleh pemerintah Republik Indonesia dengan dimulainya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Maka pada 27 Desember 1957, GEBEO diambil alih oleh pemerintah RI dengan dikukuhkan peraturan pemerintah No. 86 tahun 1958 Jo peraturan

pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang ***penentuan perusahaan listrik dan gas milik belanda***. Tahun 1961, berdasarkan peraturan pemerintah No. 67 dibentuk badan pimpinan umum perusahaan listrik negara (BPU-PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. PLN Bandung pun diganti dengan nama PLN Eksploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat, Di luar DKI Jaya dan Tangerang.

Tahun 1972, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, yang menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Kemudian, mengacu kepada peraturan Mentri PUTL No. 013/PRT/1957 tanggal 8 September 1957 tentang organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 23 TAHUN 1994 TANGGAL 16 Juni 1994. Maka bentuk perusahaan Umum Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi perusahaan perseroan (persero) dengan sebutan PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Barat sejak tangggal 30 Juli 1994, sesuai akte pendirian. Selanjutnya, sesuai Keputusan Direksi PT. PLN (persero) No. 28K/010/DIR/2001 tanggal 20 Febuari 2001, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat diubah menjadi PT. PLN (persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

2.1 Stuktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat

Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Direksi PLN No.117/DIR/85 tanggal 14 Agustus 1985 dan dilengkapi dengan surat keputusan pemimpin PT. PLN (persero)

Distribusi Jawa Barat No. 006/DJB/88 tanggal 11 Maret 1988. Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Baratberupa organisasi garis fungsional dan staf, jenjang manajemen yang meliputi unsure pimpinan, pembantu pimpinan dan pelaksana. Selain itu ada bagian yang merupakan kontrol intern yang ada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada pimpinan merupakan pejabat tertinggi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat.

Tugas pokok PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat adalah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Pertambangan danEnergi yang meliputi pembangkitan, transmisi, pendistribusian dan pengusahaan tenaga listrik sesuai dengan kebijaksaan yang ditetapkan oleh mentri serta berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi yang berlaku dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat adalah :

1. Perumusan kebijaksanaan, teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan mentri berdasarkan pelaturan perundang – undangan yang berlaku meliputi :
   a. Penyediaan tenaga listrik termasuk pembangunan sarana kelistrikan, pembangkitan, transmisi dan distribusi.
   b. Pengusahaan tenaga listrik.
   c. Pemanfaatan dan pengembangan tenaga listrik
   d. Pendidikan pengembangan tenaga listrik diluar perusahaan.
2. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Susunan organisasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dengan wilayah kerja dalam daerah tingkat I Jawa Barat yang berlokasi di Bandunga terdiri

1. Unsurpimpinan adalah pimpinan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat
2. Unsur pembantu pimpinan adalah deputy pimpinan bidang dan kepala kontrolintern. Tiap-tiap bidang terdiri dari seksi-seksi, tiap-tiap seksi terdiri dari urusan-urusan kontrol intern dari pemeriksaan.
3. Unsur pelaksana

Unsur-unsur pembantu pimpinan bidang kontruksi

A. Deputy pimpinan bidang kontruksi

1. Bagian perencanaan kontruksi, yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut :
   - 1.1. Seksi-seksi perencanaan kontruksi sipil
   - 1.2. Seksi-seksi perencanaan kontruksi jaringan
   - 1.3. Seksi-seksi perencanaan perbekalan kontruksi
2. Bagian operasi kontruksi, yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut :
   - 2.1. Seksi operasi kontruksi sipil
   - 2.2. Seksi operasi kontruksi jaringan
   - 2.3. Seksi tata usaha teknik kontruksi
3. Bagian pembekalan kontruksi, yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut :
   - 3.1. seksi tata usaha pembekalan kontruksi

3.2. Seksi gudang kontruksi

4. Bagian administrasi proyek, yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut

4.1. Seksi laporan kontruksi

4.2. Seksi administrasi pelaksana kontruksi

5. bagian pembinaan kontruksi, yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut

5.1. Seksi pembinaan kontruksi

5.2. Seksi pembinaan administrasi proyek

B. Deputy pimpinan bidang pengusahaan

Deputy pimpinan bidang pengusahaan, membawahi bagian-bagian adalah sebagai berikut :

1. Bagian perencanaan pengusahaan, yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

1.1. Seksi perencanan umum

1.2. seksi perencanaan system

1.3. Seksi perencanaan oprasi dan pemeliharaan

2. Bagian oprasi jaringan, yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

2.1. Seksi pengendalian oprasi jaringan distribusi

2.2. Seksi pengendalian pemeliharaan jaringan distribusi

2.3. Seksi penerbitan

2.4. Seksi laboratorium

3. Bagian pemasaran, yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

3.1. Seksi survey pemasara

3.2. Seksi akuisi langganan

4. Bagian pembekalan pengusahaan, yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut :

4.1. Seksi tatausaha pembekalan pengusahaan

4.2. Seksi gudang pengusahaan

4.3. Seksi angkutan dan kendaraan

5. Bagian pembinaan pengusahaan, yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut :

5.1. Seksi pengumpulanndata statistik

5.2. Seksi analisa dan evaluasi jaringa distribusi

53. Seksi analisa dan evaluasi pemasaran deputy pimpinan bidang keuangan

C. Deputy pimpinan bidang keuangan

Deputy pimpinan bidang keuangan, yang membawahi bagian-bagian sebagai berikut

1. Bagian anggaran, yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut :

1.1. Seksi anggaran kontruksi

1.2. Seksi anggaran pengusahaan

2. Bagian keuangan kontruksi, yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

2.1. Seksi pengendalian keuangan kontruksi

2.2. Seksi tata usaha keuangan kontruksi

3. Bagian keuangan pengusahaan, yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

3.1. Seksi pengendalian keuangan pengusahaan

3.2. Seksi tata usaha keuangan kontruksi

4. Bagian tata usaha langganan, yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

4.1. Seksi tariff dan hasil

4.2. Seksi piutang

4.3. Seksi pengawasan dan pemasukan data

4.4. Seksi oprasi dan komputer

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

D. Deputy pimpinan bidang kepegawaian dan administrasi, membawahi seksi-seksi sebagai berikut :

1. Bagian perencanaan, kepegawaian dan fasilitas, yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut :

1.1. Seksi perencanaan, organisasi dan pendayagunaan tenaga pegawai

1.2. Seksi perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan pegawai

1.3. Seksi perencanaan danpendayagunaan fasilitas

2. Bagian tata usaha kepegawaian, yang membawahi seksi-seksi sebagai Berikut :

2.1. Seksi tata usaha kepegawaian

2.2. Seksi kesejahteraan pegawai dan pensiun

2.3. Seksi keamanan dan keselamatan kerja

3. Bagian seketariat dan umum, yang membawah seksi-seksi adalah sebagai berikut :

3.1. Seksi secretariat dan humas

3.2. Seksi hokum

3.3.Seksi tata usaha langganan

4. Bagian pembinaan kepegawaian dan administrasi, yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut :

4.1. Seksi pembinaan kepegawaian

4.2. Seksi pembinaan administrasi bangunan

E. Kontrol intern

Kontrol intern terdiri dari :

1. pemerisa teknis

1.1. Pemeriksaan pembantu tingkat I bidang A (Perencanaan dan pembangunan)

1.2. Pemeriksaan pembantu tingkat I bidang B (Pengusaha)

2. Pemerisaan administrasi dan keuangan

2.1. Pemeriksaan pembantu tingkat I bidang C (Kepegawaian)

2.2. Pemerisaan pembantu tingkat I B (Keuangan dan perbekalan)

2.2 Deskripsi Jabatan PT. PLN

Dalam penulisan kerja peraktek ini lebihbanyak berhubungan dengan bagian akuntansi, maka yang akan dijelaskan lebih terperinci adalah bagian akuntansi. Bagian akuntansi ini bertugas untuk menangani, mengawasi, memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan akuntansi pada umumnya meliputi antara lain mencatat, mengikhtisarkan dan menyusun laporan keuangan secara berkala atas data dan dokumen keuangan atau akuntansi serta melaksanakan analisa dan evaluasi keuangan yang diprlikan.

PEMIMPIN

Pemimpin mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pemimpin mengurus dan mengelola distribusi sesuai dengan maksud dan tujuan distribusi dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari distribusi.
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan distribusi.
3. Mewakili distribusi didalam dan diluar pengadilan.
4. Menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan distribusi lengkap dengan anggaran keuangan
5. Menetapkan gaji pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai serta mengatur semuahal kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menetapkan kebijaksanaan distribusi dibidang perencanaan pembangunan sarana pendistribusian tenagalistrik dan tenaga manusia.
7. Mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan distribusi berdasarkan kebijaksanaan direksi dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
8. Mengandalikan kegiatan – kegiatan lainnya dengan persetujuan direksi dalam rangka mengembangkan pendistribusian tenaga listrik.

DEPUTY PEMIMPIN BIDANG PERENCANAAN

Tugas pokok bidang perencanaan adalah merumuskan rencana korporat distribusi, pengembangan system pendistribusian tenaga listrik kebutuhan investasi, penyajian data dan imformasi serta melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja distribusi.

DEPUTY BIDANG PEMIMPIN KONTRUKSI

Tugas pokok bidang penguasaan adalah merencanakan, mengendalikan dan membina pengoprasisn dan pemeliharaan saran pendistribusian tenaga listrik, pelayanan kepada pelanggan listrik dan listrik pedesaan.

DEPUTY PIMPINAN BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ADMINISTRASI

Tugas pokok bidang kepegawaian dan administrasi adalah melaksanakan kegiatan dalam sumber daya manusia administrasi umum, serta pelayanan hokum dan hubungan masyarakat

DEPUTY PIMPINAN BIDANG KEUANGAN

Tugas pokok bidang keuangan adalah menyusun dan memantau anggaran pendapatan dan belanja, mengelola keuangan dan akuntansi pengusahaan, pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik serta menyusun laporan keuangannya.

FUNGSI BAGIAN KEUANGAN MELIPUTI :

1. Menyusun dan memantau anggaran pendapatan, belanja distribusi serta pembinaan tariff dan daftar listrik.
2. Pengelolaan pengadaan dana.
3. Pengelolaan aliran uang
4. Pembelanjaan pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.
5. Pelaksanaan dan pembinaan system akuntansi.
6. Pelaksanaan tata usaha langganan
7. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan .

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bagian keuangan meliputi :

A. BAGIAN ANGGARAN

Tugas pokok anggaran adalah menyusun dan memantau anggaran pendapatan dan belanja perusahaan serta kebutuhan dana pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik

B. BAGIAN KEUANGAN

Tugas pokok bagian keuangan adalah membina dan mengendalikan keuangan, pembelanjaan perusahaan, pembangunan dan pemugaran saran pendistribusian tenaga listrik serta melaksanakan keuangannya.

C. BAGIAN AKUNTANSI

Tugas pokok bagian akuntansi adalah menangani, mengawasi, memberi petunjuk pelaksanan kegiatan akuntansi pada umumnya yang meliputi antara lain mencatat, mengikhtisarkan dan menyusun laporan keuangan berkala atas data dan dokumen keuangan atau akuntansi serta melaksanakan analisa dan evaluasi keuangan yang diperlukan.

Dalam melaksanakan tugasnya bagian akuntansi memfunyai fungsi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akuntansi umum distribusi
2. Pelaksanaan akuntansi perusahaan sarana pendistribusian tenaga listrik
3. pelaksanaan akuntansi pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik
4. pelaksanaan penyusunan laporan

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bagian akuntansi terdiri atas

1. **Seksi akuntansi Pengusaha**

Tugas pokok seksi akuntansi pengusaha adalah melaksanakan kegiatan akuntansi umum distribusi dan pengusahaan sarana pendistribusian tenaga listrik serta menyusun laporan keuangannya

Fungsi akuntansi pengusahaan antara lain

a. menghimpun surat keputusan, surat edaran, pengumpulan petunjuk pelaksanaan, baik yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat maupun ketentuan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengikuti perubahan perkambanganny.
b. Membuat data, menerima buku-buku harian dari seksi atau bagian lain serta membukukannya ke dalam buku besar.
c. Membuat menerima nota-nota pembukuan untuk/dari unit-unit satuan administrasi.
d. Membuat daftar pengujian buku-buku harian.
e. Membuat daftar pembagian biaya oprasi dan clearing.
f. Membina unit-unit mengenai pelaksanaan akuntansi pada umumnya.
g. Menerima, memantau dan memeriksa serta menganalisa laporan pembukuan (LP) dan laporan perhitungan tahunan (LPT) dari unit-unit sebagai bahan penyesuaian laporan (LP/LPT) pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat.
h. Memantau dan mengawasi saldo-saldo perkiraan aktiva dan vasipa lancar, perkiraan penutupan atau rekening Koran, perkiraan netral dari unit-unit dan satu administrasi lain.

i. Menerima laporan dari unit-unit mengenai penerimaan BBM yang dibayar secara terpusat dan menindak lanjuti.

j. Mencatat, mengawasi dan mengikuti perubahaan seluruh inventari yang ada urusannya untuk disampaikan datanya kepada urusan akuntansi aktiva tetap (AT) dan urusan fasilitas dan inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

k. Menyiapkan data yang diperlukan untuk bahan laporan

l. Menghimpun surat-surat keputusan, surat edaran dan pengumuman.

m. Mengoreksi data induk (master) persediaan untuk komputerisasi.

n. Membuat laporan bulanan persedian.

o. Melaksanakan Tata Usaha Keuangan Gudang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

p. Secara berkala melaksanakan inventaris fisik persedian material

2. Seksi Akuntansi Kontruksi

Tugas seksi akuntansi kontruksi adalah melaksanakan kegiatan akuntansi pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik serta akuntansi aktiva tetap.

Funfsi seksi akuntansi kontruksi antara lain:

a. Mencatat seluruh aktiva tetap kantor distribusi baik yang bergerak dikartu atau buku aktiva. Aktiva tetap yang tidak beroprasi dan material cadangan.

b. Membuat perincian mutasi aktiva tetap bulanan berdasarkan mutasi kartu besar

c. Membuat bukuan harian aktiva tetap untuk diteruskan keseksi akuntansi umum

d. Melaksanakan administrasi pekerjaan dalam pelaksanaan kontruksi baik yang dilaksanakan oleh kantor distribusi maupun oleh unit-unit.

e. Mencatat realisasi biaya pekerjaan dalam pelaksanaan kontruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk rincian sumber dananya

f. Memantau pelaksanaan pekerjaan dalam pelaksanaan kontruksi dan memproses lebih lanjut pekerjaan dalam pelaksanaan

g. Menerima, memeriksa dan menganalisa laporan-laporan dari unit mengenai realisasi pekerjaan dalam pelaksanaan tersebut untuk ditindak lanjuti

h. Menyiapkan data aktiva tetap tidak beroprasi untuk di usulkan penghapusannya.

i. Melaksanakan administrasi pekerjaan dalam pelaksanaan penarikan Aktiva Tetap oprasional dan Aktiva Tetap tidak beroprasi yang dilaksanakan oleh kantor distribusi maupun oloh unit-unit.

D. BAGIAN TATA USAHA LANGGANAN

Tugas pokok bagian tata usaha langganan adalah melaksanakan dan membina system tata usaha langganan penjualan tenaga listrik serta tariff dan hasil usaha.

Fungsi Unit-unit Administrasiadalah sebagai berikut :

a. Menerima, mengawasi dan memantau laporan pelaksanaan program pemeliharaan triwulan dari unit-unit untuk bahan pembuatan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Menghimpun data mengenai realisasi biaya inventasi untuk bahan pembuatan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Menghimpun data untuk listrik pedesaan dan untuk bahan pembuatan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Menyiapkan bahan laporan indicator hasil usaha yang ada hubungannya dengan persediaan.
e. Melaksanakan tata usaha keuangan bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f. Memproses bon-bon transaksi material persediaan gudang kontruksi dan mengirimkannya kebagian tata usaha untuk diproses lebih lanjut.
g. Mengoreksi data induk (master) persediaan untuk komputerisasi akuntansi persediaan.

Masing – masing seksi, bagian dan bidang mempunyai hubungan yang erat dengan satu sama lain saling menunjang serta tidak dapat di pisahkan.

2.4 Aspek kegiatan PT. PLN

Pada intinya aspek kegiatan PT.PLN (Persero) Unit Distribusi Jawa Barat adalah menjual produk berupa energi listrik yang bias dipergunakan untuk menjalankan mesin dan penerangan. Berdasarkan tujuan pemakaian listrik, maka energi listrik yang dijual kepada pelanggan di bagi kedalam beberapa golongan tarif yaitu : Tarif S (kepentingan social), Tarif R (rumah tangga kecil dan besar), Tarif B (bisnis), Tarip I (industri) dan Tarif P (pemerintah dan penerangan jalan umum).

Berdasarkan keppres No 83 tahun 2001, ditambahkan golongan tariff baru, yaitu Tarif T (traksi / kereta listrik) dan Tarif C (curah). Untuk keperluan khusus, PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Disribusi Jawa Barat menyediakan golongan tariff

(multiguna) yang di peruntukan bagi tenaga listrik dengan persyaratan khusus atausfesifik serta memberi nilai tambah bagi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat maupun bagi pelangggan. Teransaksi multiguna sangat menguntungkan, karena dibuat berdasarkan kesepakatan semua pihak melalui proses negoisasi yang transparan dan saling menguntungkan serta dituangkan dalam perjanjian tersendiri.

Jenis transaksi multiguna terdiri dan transaksi energi listrik maupun non energi listrik. Transaksi energi listrik meliputi multiguna ekspor – inpor musiman, prabayar, beban dapat diatur, listrik hari libur , transaksi JBTD. Transaksi non energi listrik adalah penyediaan tingkat keandalan layanan, fasilitas ketenagakerjaan dan penyediaan layanan jasa ketenaga listrikan.